

ABSTRAK

Muhammad Alfizar (01043170087)

ECONOMIC DIPLOMACY UNDER JOKOWI'S ADMINISTRATION: A CASE STUDY OF ECONOMIC DIPLOMACY RELATED TO PALM OIL EXPORT TO EUROPEAN UNION (EU)

(xiv + 97halaman: 4 ilustrasi; 2 tabel; 3 lampiran)

Kata Kunci: President Jokowi Diplomasi Ekonomi, Reformasi Birokrasi, Analisis Kebijakan Luar Negri, Hubungan Indonesia-EU, Minyak Sawit, Negosiasi

Kebijakan luar negeri Pemerintahan Jokowi bertujuan untuk menggunakan ekonomi diplomasi dalam menopang dan menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh Sebab itu, Presiden Jokowi melakukan beberapa langkah dalam mereformasi birokrasi serta melakukan perubahan struktur koordinasi kementerian yang terkait dengan pembuatan kebijakan ekonomi diplomasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan struktur birokrasi pembuat kebijakan ekonomi diplomasi Indonesia dan bagaimana reformasi yang di lakukan oleh Presiden Jokowi mempengaruhi kemampuan ekonomi diplomasi Indonesia di luar negri. Skripsi ini menggunakan teori analisis kebijakan luar Negri serta menganalisis akibat dari reformasi yang di lakukan pada kebijakan domestik seperti perubahan struktur birokrasi dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negri Indonesia. Dengan menggunakan hasil teori analisis tersebut, skripsi ini lalu menggunakan studi kasus permasalahan kelapa sawit di antara EU dan Indonesia untuk memperlihatkan efek dari perubahan Presiden Jokowi di lapangan. Di temukan, perubahan yang di lakukan President Jokowi sangat berkonsentrasi dalam peningkatan ekonomi domestik dan perubahan radikal dalam struktur birokrasi pemerintahan. Perubahan ini tidak di ikuti dengan pertimbangan dinamika di antara kementerian yang terkait dan dinamika pemerintahan pusat dan daerah. Hal tersebut mengakibatkan dalam studi kasus kelapa sawit EU-Indonesia, Pemerintah tidak mampu untuk menegakan kebijakan di lapangan, kurang bersatunya pembuat kebijakan ekonomi diplomasi Indonesia, sehingga pada negosiasi embargo kelapa sawit dengan EU kurang efektif dan berhasil . Oleh karena itu, kebijakan ekonomi diplomasi Indonesia Presiden Jokowi dapat mengakibatkan lemahnya kemampuan ekonomi diplomasi indonesia di tingkat internasional.

Referensi: 68 refrensi (12 Buku+28 Jurnal+13 Sumber Pemerintah+15 Sumber Online) (2000-2020)

ABSTRAC

Muhammad Alfizar (01043170087)

**ECONOMIC DIPLOMACY UNDER JOKOWI'S ADMINISTRATION: A
CASE STUDY OF ECONOMIC DIPLOMACY RELATED TO PALM OIL
EXPORT TO EUROPEAN UNION (EU)**

(XIV + 97pages: 4 illustration; 2 tabel; 3 lampiran)

Key Word: Jokowi's Economic Diplomacy, Bureaucratic reform, Foreign Policies
Analysis theory, EU-Indonesia Palm Oil Dispute, Negotiation

The Jokowi government's foreign policy aims to use economic diplomacy to support and increase Indonesia's economic growth. Therefore, President Jokowi took several steps in reforming the bureaucracy and making changes to the coordination structure of the ministries related to the making of diplomatic, economic policies. This study aims to explain the bureaucratic structure of Indonesian diplomatic, economic policymakers and how the reforms carried out by President Jokowi affect Indonesia's diplomacy economic abroad. This thesis uses the theory of foreign policy analysis. It analyzes the consequences of reforms carried out on domestic policies, such as changes in the bureaucratic structure in influencing Indonesia's foreign economic policies. The theoretical analysis result then uses in the case study of the oil palm problem between the EU and Indonesia to show the effects of President Jokowi's changes in the field. It was found that the changes made by President Jokowi were very concentrated on improving the domestic economy and radical changes in the structure of the government bureaucracy. This change was not followed by considering the dynamics between the relevant ministries and the dynamics of the central and local governments. It resulted in the EU-Indonesia palm oil case study; the Government was unable to enforce policies in the field, the lack of unity of Indonesian diplomatic, economic policymakers so that the palm oil embargo negotiations with the EU were less effective and successful. Therefore, President Jokowi's economic policy of Indonesian diplomacy could weaken Indonesia's economic diplomacy capacity at the international level.

Reference: 68 reference (12 Book+28 Journal+13 Government source+15 Online source) (2000-2020)